

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar Riset

Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1.1. Kondisi umum

Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.22/PERMEN-KP/2017 tertanggal 27 Maret Tahun 2017 di Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I BRSDM dan dibina secara teknis oleh Pusat Riset Perikanan (Puriskan).

BBRBLPP telah berhasil mengembangkan teknologi perbenihan beberapa spesies ikan laut, krustase dan kekerangan bahkan pembenihan ikan bandeng dan kerapu telah berkembang ditingkat petani dengan prototype hatcheri skala rumah tangga (HSRT). Dewasa ini tidak kurang dari 6,700 bak hatcheri di Kabupaten Buleleng secara fleksibel dan aktif melakukan kegiatan produksi benih bandeng maupun kerapu bebek dan kerapu macan. Keberhasilan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih teridentifikasi berbagai masalah teknis yang menghambat perkembangan budidaya laut antara lain mutu induk, telur, benih, penyakit, pakan dan teknologi budidaya pembesaran. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu lebih diintensifkan.

Selain penelitian untuk mengatasi berbagai kekurangan pada berbagai aspek budidaya, penelitian terapan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya laut perlu mendapat porsi yang lebih besar. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian skala laboratorium dapat diterapkan pada skala usaha sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pembudidaya. Sekitar 30 jenis ikan dan non-ikan yang telah dan sedang diteliti di BBRBLPP pada tahun 1984-2009 namun teknologi perbenihan secara utuh dengan penerbitan petunjuk teknis

baru dilakukan pada 12 jenis yaitu udang windu (*Penaeus monodon*), Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*), bandeng (*Chanos chanos*), kerapu bebek (*Cromileptis altivelis*), kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*), Kerapu raja sunu (*Plectropoma laevis*), kerapu macan (*Ephinephelus fuscoguttatus*), kerapu batik (*E. microdon*), kerapu lumpur (*E. coioides*), kakap merah (*Lutjanus argentimaculatus*), kepiting bakau (*Scylla paramamosain*), rajungan (*Portunus pelagicus*), dan teripang (*Holothurea scabra*).

Tugas pokok BBRBLPP adalah melaksanakan riset strategis dalam bidang budidaya laut meliputi: perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan dan toksikologi, teknologi budidaya dan penyuluhan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural Bagian dan Subbagian pada BBRBLPP adalah sebagai berikut.

1.1.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, BBRBLPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahi subbagian/seksi sebagai berikut:

A. Bagian Tata Usaha

- Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional dan tata laksana, Pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

(A.1). Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian administrasi jabatan fungsional dan tata laksana.

(A.2). Sub Bagian Keuangan dan Umum Subbagian Keuangan dan Umum dengan tugas melakukan urusan keuangan persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan

B. Bidang Tata Operasional

- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan.

(B.1). Seksi Program dan Anggaran

Seksi Program dan Anggaran, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.

(B.2). Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

C. Bidang Pelayanan Teknis, Sarana dan Penyuluhan

- Bidang Pelayanan Teknis dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.
- Menyelenggarakan fungsi persiapan kerjasama, pelayanan teknis, jasa diseminasi, informasi, komunikasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan budidaya laut serta pengelolaan perpustakaan.
- Pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut

(C.1) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Riset

Seksi kerjasama dan pelayanan Riset, informasi, komunikasi publikasi hasil riset dan pengembangan budidaya laut, serta pengelolaan.

(C.2). Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya laut.

(C.3) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengelolaan berkaitan dengan tugas dan fungsi para penyuluh perikanan di lapangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pada tingkat BBRBLPP dibentuk empat kelompok peneliti yaitu kelompok genetika, breeding dan bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi budidaya serta kesehatan ikan. Selain tenaga fungsional peneliti, jabatan fungsional non peneliti yaitu jabatan fungsional teknisi litkayasa, pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL – BALI



Gambar 1. Struktur Organisasi BBRBLPP

1.1.2. Sumber Daya Penelitian dan Pengembangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional peneliti, penyuluh maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset Balai yang meliputi tanah, bangunan kantor, guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan dalam pengelolaan riset, penyuluhan, dan pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan penelitian dapat berasal dari kegiatan kerjasama riset dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (renewable resources) dan tidak terbarukan (non-renewable resources). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (ocean thermal energy conversion). Sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources) meliputi minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi antara lain ikan tuna sirip kuning, kakap putih, kerapu sunu, abalone, teripang, dan lobster untuk dikembangkan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara ilmiah.

Peningkatan produksi perikanan dapat dicapai melalui inovasi teknologi yang efektif dan efisien, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. Berbagai komponen dan paket teknologi perikanan telah banyak dihasilkan oleh BBRBLPP yang dihasilkan ini harus segera secara intensif dikomunikasikan kepada pengguna agar dapat diimplementasikan dalam usaha yang riil sebagai upaya peningkatan efisiensinya. Aplikasi teknologi yang lebih inovatif akan menjadikan sektor perikanan menjadi ladang usaha yang lebih menarik bagi masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan yang menguntungkan.

Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah menghasilkan paket teknologi pembenihan seperti kepiting, rajungan, ikan kobis, kakap merah, ikan kudi dan udang windu. Sedangkan terdapat komoditas yang masih digunakan dalam kegiatan riset di tahun 2019 diantaranya adalah tuna sirip kuning, lobster laut, ikan kerapu sunu, kakap putih, teripang dan abalone. Potensi SDM Penyuluhan yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Bali, NTB, NTT dan Kalimantan tengah menjadi ujung tombak pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh BBRBLPP.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset Perikanan untuk mendukung pembangunan KP adalah belum tersedianya kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRSDM sebagai *Inhouse Consultant* lebih optimal, belum tersedia. Disini lain menurunnya fokus riset untuk upaya antisipatif dari BBRBLPP untuk menjawab permasalahan yang dihadapi perikanan budidaya laut saat ini antara lain; penurunan kualitas benih, merebaknya berbagai macam penyakit yang terdapat pada ikan laut dan udang, ketersediaan benih dan induk unggul yang belum memadai, pakan yang tidak efektif

dan mahal, penurunan kualitas lingkungan serta perubahan iklim global yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan keberlanjutan perikanan laut.

Strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas adalah melalui penelitian yang bersifat dasar, terapan maupun pengembangan untuk menemukan teknologi tepat guna dalam perbenihan dan pembesaran ikan laut serta pengembangan kapasitas SDM yang kompeten.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya laut serta sintesis kebijakannya. Dengan demikian, teknologi dan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam mengantisipasi berbagai dampak dari pengaruh eraglobalisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II.

VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

2.1. VISI

Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan BBRBLPP sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset Perikanan dan Pusat pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Perikanan, Pusat pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta BRSDM KP.

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi dari BBRBLPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong..

2.2. MISI

Misi BBRBLPP adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
 3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
- Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

- Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.
- Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

1.4. Sasaran Strategis

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi BBRBLPP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan sektor perikanan 2020 – 2024 adalah :

Meningkatkan kompetensi SDM riset dan penyuluhan perikanan guna meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan secara optimal.

Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN PERIKANAN

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah arahan pembangunan nasional yang mempunyai visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Agenda pembangunan Nasional ini harus diimplementasikan oleh kementerian yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dua diantaranya mempunyai kaitan langsung yang penting dengan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pertama adalah tentang meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan yang kedua adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, agenda nasional tersebut telah dilengkapi dengan program “quick wins” yaitu program yang diharapkan dapat menjadikan pendongkrak keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Isu dan fokus kegiatan riset pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan didasarkan pada penetapan isu kegiatan BRSDM KP. Adapun isu kegiatan BRSDM KP didasarkan pada arah kebijakan nasional dengan mempertimbangkan agenda riset nasional, Rencana Kerja Pemerintah, issue KP baik regional dan internasional serta kebutuhan eselon I lingkup KKP.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BBRBLPP)

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)

Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya.

Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)

Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).

Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan database kelautan dan perikanan.

Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;

Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;

Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim,

Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi

Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan

Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020–2024

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.

4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		T A H U N			
		2020	2021	2022	2023
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	59,16	60,31	61,47	62,66
CUSTOMERS PERSPECTIVE					
SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat					
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,9	8,11	8,31	8,51
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,43	6,86	7,27
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤53,7	≤80	≤80	≤80
6	Luas Kawasan konservasi (juta Ha)	23,4	24,1	25,1	26

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat						
7	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	17.175	17.696	18.296	18.916	19.546
SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan						
8	Jumlah hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (paket)	5	10	10	10	15
SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab						
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3	5	7	11	11
10	Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24				102
SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing						
11	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,86	29,39	30,98	32,72
12	Produksi garam rakyat (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif						
16	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	54,18	60	65	70	75
17	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	89	90	91	92	93
18	Indeks efektifitas operasi armada pengawasan SDKP	7,85	7,95	8,05	8,15	8,25
19	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	79	81	82	82
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik						
20	Indeks profesionalisme ASN (indek)	72	73	74	75	76
21	Indeks SPBE	70	71	72	73	74
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	85	85	85	85	85
23	Level maturitas SPIP	3	3	3	3	3
24	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
25	Predikat Sakip KKP	A	A	A	A	A
26	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Paparan Rancangan Teknokratik Renstra KKP Tahun 2020 - 2024

4.2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBRBLPP Tahun 2020-2024

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Pusat Riset perikanan (Puriskan) dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Puslatluh) yang membutuhkan percepatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan sasaran kegiatan, BBRBLPP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBRBLPP TA 2020 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	IKU 1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh (kelompok)	4.609	4.609	4.809	4.909	5.009
		IKU 2	Jumlah kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	200	200	200	200	200
		IKU 3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BBRBLPP (kelompok)	210	210	210	210	210
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS3	Hasil riset dan inovasi BBRBLPP yang dimanfaatkan	IKU 4	Jumlah Teknologi Hasil Riset KP yang dihasilkan	6	3	6	6	6
		IKU 5	Jumlah Produk Biologi yang	2	-	-	-	-

			dihasilkan					
		IKU 6	Jumlah Lembaga Riset Perikanan yang terstandar	1	1	1	1	1
		IKU 7	Jumlah sarana dan prasarana BBRBLPP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	1	1
		IKU 8	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BBRBLPP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	4	3	4	4	4
		IKU 9	Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (Buah)	18	20	20	20	20
SS3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	IKU 10	Tersedianya Metode Percontohan Penyuluhan KP (lokasi)	1	1	4	5	6
		IKU 11	Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi sektor KP	648	-	648	648	648
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Tata kelola pemerintahan BBRBLPP yang baik	IKU 12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BBRBLPP (indeks)	72	73	72	72	72
		IKU 13	Persentase unit kerja BBRBL-PP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	82	82	82

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Penelitian Budidaya Laut adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

	Piutang Negara/DJKN	
--	---------------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikuangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.